



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Temua BPK Rp 4,2 M di Proyek Pemprov

Berpotensi Rugikan Negara

BENGKULU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu menemukan, sebanyak Rp 4,2 miliar yang berpotensi merugikan negara di paket proyek Provinsi Bengkulu. Hal tersebut tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), kepatuhan atas belanja modal dan

barang jasa tahun anggaran 2019. Penyerahan LHP tersebut juga diberikan kepada Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Lebong di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, kemarin (20/1) siang.

“Temuan tersebut terkait anggaran belanja modal, seperti paket pekerjaan gedung, jalan, dan irigasi tidak sesuai kontrak,” ungkap Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantri, SE, MM, Ak, CA, kemarin (20/1).

Untuk tujuan dari pemeriksaan, dijelaskan Aryo jika hal tersebut untuk menguji dan menilai, apakah belanja modal dan belanja barang jasa 2019 telah dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundangan undangan yang berlaku, atau seba-

liknya.

Dikatakannya, total keseluruhan temuan mencapai sebesar Rp 5,292 miliar. Dimana terdiri dari paket proyek Provinsi Bengkulu sebesar Rp 4,22 miliar, Kabupaten Lebong sebesar Rp 598,58 juta, Mukomuko sebesar Rp 468,53 juta.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran paket pekerjaan. Dengan total keseluruhan mencapai Rp 823,66 juta. Terdiri dari Kabupaten Seluma sebesar Rp 542,94 juta, Mukomuko sebesar Rp 194,47 juta, dan Lebong atas pekerjaan yang tidak dilakukan sebesar Rp 86,9 juta. Selain itu, BPK juga menemukan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp 38,19 juta. Untuk pembangunan Kantor Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong.

“Ada juga temuan keterlambatan atas paket pekerjaan yang belum dan kurang dikenakan seluruhnya sebesar Rp 38,03 juta terdiri dari Kabupaten Lebong sebesar Rp 25,02 juta dan Kabupaten Mukomuko sebesar Rp 13,01 juta,” jelasnya.

Ada juga temuan atas pekerjaan yang diputus kontrak belum dicairkan sebesar Rp 129,27 juta. Yakni pada Dinas PU Kabupaten

Lebong dan sebesar Rp 163,08 juta pada pembangunan gedung rawat inap VIP pada RSUD Mukomuko. RSUD ini juga dinilai sebagai pembangunan gedung berpotensi gagal konstruksi sebesar Rp 978,51 juta.

Arya juga menjelaskan untuk temuan terkait belanja barang jasa, berupa kelebihan pembayaran gaji personel pada belanja konsultasi sebesar Rp 226,47 juta di 5 OPD Kabupaten Mukomuko. Juga pengadaan pengembangan ternak kambing sebesar Rp 18,83 juta.

“Bahkan juga terdapat dokumen personel tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam dokumen penawaran dan kontrak konsultan diragukan keabsahannya, itu ada di salah satu daerah,” paparnya.

Untuk diketahui, LHP tersebut langsung diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Wakil Gubernur Bengkulu, H. Dedy Ermanisyah, SE dan Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto,

SE, MBA.

Sementara itu, Wakil Gubernur mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temua BPK tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada, yang akan diselesaikan dalam waktu 60 hari. “Namanya pemerintah itu kan diaudit oleh BPK, maka kita harus menindaklanjuti temuan itu,” ucap Dedi.

Di sisi lain, Waka II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, mengapresiasi kinerja BPK. Pasalnya hal itu dapat memacu OPD untuk menyelesaikan laporan secara profesional dan tepat waktu. Ia juga menyayangkan dengan temuan dokumen yang diragukan keabsahannya. Dia mengimbau agar jajaran OPD untuk menyamakan tujuan dari pemeriksaan audit BPK untuk membangun Provinsi Bengkulu.

“Kurang profesional, terkait dengan pemalsuan dokumen. Jangan sampai ada lagi jembatan ambrol. Itu contoh yang membahayakan publik,” kata Suharto. (cw2)